

## Data UIP

Nama ardi kasmono  
Kontak 085645393701  
Email ardikasmono@gmail.com

## Informasi Utama

# Apel Baja (Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa)

Tanggal Inisiatif 2014-04-16  
Kategori Mendorong Pemerintahan Berbasis Pendekatan Kolaboratif dalam Era Informasi  
Kriteria  
Memperkenalkan Pendekatan Baru  
Pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik

# Apel Baja (Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa)

## Ringkasan singkat

Apel Baja (Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa) yang dikembangkan UPT P2BJ hadir untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan yang menjadikan pelayanan tidak efektif, berbelit-belit, tidak transparan, boros waktu dan biaya, tidak profesional dan segudang permasalahan lain yang menjadikan pelayanan tidak berkualitas. Apel Baja merupakan aplikasi online berbasis website yang mempunyai fungsi untuk meringkas jarak, waktu dan biaya; memudahkan pengusulan lelang, verifikasi, koreksi, koordinasi, kaji ulang, pengembalian usulan lelang, distribusi pekerjaan, SPT online sampai dengan pengembalian dokumen hasil pelelangan. Apel Baja mampu mencatat tracking waktu tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pengguna terhadap pekerjaan yang dalam tanggung jawabnya, sehingga bisa memacu kinerja dengan batasan waktu yang ditentukan sesuai SOP. Apel Baja dapat memudahkan koordinasi Pokja yang merupakan pegawai ad hock yang tidak melekat di UPT P2BJ. Apel Baja efektif menjadi motor untuk menghemat belanja pemerintah, pada 2014 terdapat 1.300 paket pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai total HPS Rp. 1.908.413.719.000,00, nilai total terkontrak Rp. 1.699.904.474.000,00 sehingga belanja pemerintah dapat dihemat sebesar Rp. 208.509.245.000,00. Jumlah nilai yang tidak sedikit untuk penghematan belanja pemerintah, demikian juga pada 2015 terjadi peningkatan belanja pemerintah menjadi 1.528 paket pekerjaan dengan nilai total HPS Rp. 3.508.217.192.448,00, nilai terkontrak Rp. Rp. 3.254.183.772.160,00 terdapat peningkatan penghematan belanja pemerintah dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 254.033.420.288,00.

Apel Baja merupakan inovasi pelayanan publik yang mempunyai banyak manfaat diantaranya meningkatkan tercapainya tujuan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kinerja pegawai pemberi dan penerima pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan transparansi dan keakuratan data pada monitoring dan evaluasi, meningkatkan penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan terpenuhinya kebutuhan barang/jasa maupun infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik perlu menggunakan Apel Baja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## Proposal

### Analisis Masalah

#### **Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?**

Apel Baja UPT P2BJ merupakan aplikasi pelayanan pengadaan barang/jasa untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada 381 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 73 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum adanya inovasi Apel Baja pelayanan terasa sangat berbelit-belit, boros biaya dan waktu, tidak transparan dan tidak ada kepastian proses pelayanan, serta tidak efektif dan efisien. Permasalahan ini terjadi dikarenakan 73 SKPD dan masing-masing Unit Pelaksana Teknisnya mempunyai lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten

dan kota di Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis terjauh dari pusat pemerintahan provinsi terletak di Kabupaten Banyuwangi yaitu UPT PPMHP Banyuwangi Dinas Perikanan yang berjarak 296 km yang dapat ditempuh dengan waktu selama 6 jam 42 menit melalui perjalanan darat dengan perkiraan perjalanan normal. Jarak dan waktu kembali menjadi permasalahan dalam pengusulan dokumen lelang dan pengembalian dokumen hasil pelelangan secara manual. Analoginya jika pengusulan dokumen dilakukan secara manual memerlukan waktu 1 (satu) hari kerja, apabila ada koreksi dan kekurangan persyaratan harus kembali untuk diperbaiki serta diusulkan kembali yang memerlukan waktu 1 (satu) hari kerja, dan pengembalian dokumen hasil pelelangan yang memerlukan waktu 1 (satu) hari kerja sehingga minimal 3 (tiga) hari kerja diperlukan untuk proses usulan dokumen, koreksi dan perbaikan dokumen serta pengembalian dokumen hasil pelelangan. Perjalanan tersebut juga harus didukung dengan biaya perjalanan dinas yang tidak sedikit. Jika pada 2014 terdapat 1300 paket pekerjaan bisa diperkirakan pemborosan biaya dan waktu untuk melakukan perjalanan dan membiayai perjalanan tersebut.

Sebelum adanya Apel Baja, PPK yang mengusulkan dokumen lelang tidak tahu secara pasti dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk jenis pekerjaan konstruksi, konsultasi, barang dan jasa lainnya. Dalam pengusulan dokumen, tidak ada jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen yang diusulkan secara manual oleh PPK atau yang dikuasakan. Tidak ada catatan waktu dalam pengusulan dokumen, tahapan proses verifikasi mulai dari Seksi Pelayanan, Seksi Distribusi dan Pengaduan hingga ke Kelompok Kerja (Pokja) untuk dilakukan kajian ulang hingga siap untuk dilelangkan serta dokumen hasil pelelangan siap untuk dikembalikan. Sehingga berakibat pada tidak terkontrolnya tugas pada masing-masing bagian, dan PPK tidak bisa melakukan pemantauan apakah dokumen yang diusulkan sudah lengkap dan benar hingga siap untuk diumumkan dalam pelelangan.

Petugas pemberi pelayanan UPT P2BJ mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran secara manual dikarenakan banyaknya dokumen yang diusulkan, tentunya juga memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan penyimpanan dan manajemen pengarsipan. Apabila ada koreksi dan perlu dikoordinasikan dengan PPK harus dilakukan secara manual, telepon dan pesan singkat satu-persatu sesuai dengan kesalahan pengusulan dokumen lelang. Apabila paket pekerjaan telah lolos verifikasi di Seksi Pelayanan, pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pokja masih dilakukan secara manual dan bertahap. Padahal hampir sebagian besar Pokja merupakan pegawai *Ad Hoc* (tidak permanen) di UPT P2BJ yang berstatus pegawai tetap di SKPD masing-masing sehingga tidak selalu berada di kantor UPT P2BJ. Tidak ada pencatatan secara *real time* terhadap pekerjaan yang diusulkan, dalam proses kaji ulang oleh pokja, proses pelelangan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pekerjaan yang telah selesai di lelangkan, pekerjaan yang lelang gagal dan pelelangan yang mendapatkan sanggah maupun pengaduan dari penyedia barang/jasa.

## **Pendekatan Strategis**

**Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?**

Inovasi awal Apel Baja pada April 2014 berasal dari Kepala Seksi Pelayanan UPT P2BJ yaitu Setya Teguh Irianta, SE. Kelompok sasaran utama yang menerima manfaat dari Apel Baja adalah Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) SKPD, Kelompok Kerja (Pokja), Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD. Kelompok sasaran tersebut mendapatkan banyak kendala dalam pelayanan pengadaan barang/jasa yang menjadikan pelayanan tidak efektif dan efisien. Berbekal dari permasalahan yang ada muncullah inovasi Apel Baja untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan. Langkah awal yang dilakukan dengan membentuk Tim Teknologi Informasi Apel Baja untuk melakukan perbaikan secara konsisten sistem terhadap sistem dan data base. Adapun Tim IT ini terdiri dari pegawai UPT P2BJ dari seksi Pelayanan dan Seksi Distribusi dan Pengaduan yang merupakan administrator Apel Baja.

UPT P2BJ melakukan sosialisasi kepada 73 SKPD di Jawa Timur dengan menghadirkan PPK dan pegawai dari masing-masing SKPD yang aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai administrator SKPD. Administrator SKPD mempunyai kewenangan untuk membuat user PPK, melakukan kontrol terhadap aktivitas PPK dalam mengusulkan dokumen lelang hingga menerima dokumen hasil pelelangan yang dikirimkan secara online melalui Apel Baja. Admin SKPD dan PPK sebagai pengguna Apel Baja seringkali memberikan masukan kepada Tim IT P2BJ untuk melakukan perbaikan, penambahan fitur dan perbaikan terkait dengan monitoring evaluasi secara real time.

Berbagai permasalahan terkait dengan pelayanan UPT P2BJ diinventarisir untuk diselesaikan dengan Apel Baja. Apel Baja sebagai aplikasi yang mempunyai jurus jitu untuk menyelesaikan problem jarak yang selalu berdampingan dengan tingginya biaya dan banyaknya waktu yang terbuang. Dengan adanya inovasi ini, tinggal "klik" pada mouse komputer/ laptop di meja masing-masing PPK bisa langsung diterima dan diverifikasi oleh Seksi Pelayanan yang selalu siap untuk memberikan pelayanan. Apabila terdapat kesalahan dokumen usulan lelang dari PPK, pemberi layanan UPT P2BJ dan Pokja bisa memberikan koreksi dan saran perbaikan seperti *chatting* pada media sosial yang lagi *ngetren* saat ini. Semua aktivitas mulai membuat dokumen usulan lelang, mengajukan, koreksi, verifikasi, pengembalian ke PPK, dikembalikan lagi ke UPT P2BJ, SPT online, diumumkan lelang, sanggah, hingga pengembalian hasil lelang secara online semuanya tercatat dengan baik. Hal ini memberikan transparansi proses layanan untuk mengurangi lamanya proses dan menghindari saling mengkambing hitamkan antara PPK SKPD dan UPT P2BJ. Sehingga usulan dokumen lelang bisa di tindaklanjuti untuk di umumkan di LPSE Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) hari kerja apabila persyaratannya sudah lengkap dan benar.

Apel Baja memberikan kejelasan dari persyaratan dokumen lelang yang sebelumnya tidak jelas dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Kejelasan itu sebagai pedoman PPK untuk mengusulkan pekerjaan yang akan dilelangkan. Misalnya dalam pelelangan pekerjaan konstruksi, persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya surat permintaan lelang dari SKPD, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Bill of Quantity* (BQ), spesifikasi teknis, gambar, rancangan kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK), dan lebar asistensi dari instansi terkait (khusus bangunan gedung).

Penyempurnaan Apel Baja pada akhir 2015 melahirkan Apel Baja 2016 dengan fitur yang lebih lengkap yang dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan, *interface* yang lebih *friendly* mengikuti perkembangan sistem Android, adanya SMS *Broadcast* untuk memberitahukan ke PPK jika ada koreksi dan pengembalian paket hasil pelelangan dari UPT P2BJ serta pelaporan monitoring evaluasi (monev) yang lebih detail dan akurat. Sampai dengan 13 Januari 2016 pukul 14.30 data pada monev tercatat 110 pekerjaan yang telah di ajukan, 68 pekerjaan selesai, 34 pekerjaan dalam proses dan 8 pekerjaan dalam proses kaji ulang Pokja. Langkah ini merupakan strategi untuk

memecahkan permasalahan yang timbul pada awal berdirinya UPT P2BJ dimana hampir semua pelayanan dilakukan secara manual

### **Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif**

Apel Baja merupakan aplikasi online berbasis website untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kelancaran pelayanan pengadaan barang/ jasa yang pertama kali digunakan oleh ULP se-Indonesia. Aplikasi ini memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan pengadaan barang/jasa yang tidak diakomodir oleh aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP diantaranya SIRUP, LPSE, E-Katalog, dan Monev. Apel Baja secara signifikan dapat menurunkan intervensi dari PA/ KPA SKPD karena langsung berhadapan dengan sistem, tidak *man to man*. Sehingga sistem ini bisa meluruskan kembali rel yang sudah mulai bengkok, artinya pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mengikuti aturan. Proses pelelangan bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan benar untuk mendapatkan penyedia terbaik yang memenuhi persyaratan. Apel Baja sudah mendapatkan garansi kehandalan sistem dari ISO 27001:2013 sehingga keamanan data, prosedur kerja, *back up* sistem sudah memenuhi standar pelayanan berbasis IT.

Apel Baja mendapatkan apresiasi dari LKPP dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lain dengan melakukan studi banding ke kantor UPT P2BJ. Terdaftar sedikitnya 20 ULP yang telah melakukan studi banding untuk belajar tentang Apel Baja diantaranya ULP Kementerian Keuangan RI, ULP Provinsi Sumatera Utara, ULP Provinsi Kalimantan Selatan, ULP Kota Surabaya, ULP Kota Bandung, ULP Kabupaten Pati dan ULP yang lain

## **Pelaksanaan dan Penerapan**

### **Bagaimana strategi ini dilaksanakan?**

UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Pada 3 februari 2014 dilantik pejabat pelaksana teknis Kepala UPT P2BJ, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Distribusi dan Pengaduan oleh Gubernur Jatim secara langsung. Untuk menegaskan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkanlah Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Setelah itu secara bertahap dilakukan pengangkatan Pokja dan mutasi pegawai untuk memperkuat kinerja hingga sekarang terdapat 48 pegawai PNS dan Non PNS.

Pembentukan Apel Baja dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pelayanan pengadaan barang/ jasa yang cukup kompleks seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Muncul inisiasi untuk merubah pelayanan yang dilakukan dengan manual menjadi pelayanan online berbasis web yang akan mengurangi intensitas bertemunya pemberi dan penerima layanan. Mulailah dibuat *grand design* Apel Baja dalam bentuk *Flow Chart* oleh bagian yang membidangi pelayanan di UPT P2BJ

yaitu seksi pelayanan UPT P2BJ. *Flow Chart* tersebut menggambarkan bagaimana alur kerja Apel Baja bisa memberikan kemudahan PPK untuk dapat mengusulkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan di UPT P2BJ. Pada awalnya, pelayanan dibagi secara sederhana yaitu *front office* dan *back office*. *Front Office* diistilahkan untuk pelayanan yang langsung berhadapan dengan pihak pengguna layanan yaitu PPK. Sedangkan *back office* memberikan pelayanan kedalam terhadap paket pekerjaan yang telah lolos verifikasi pada tahap *front office*. *Back office* lebih cenderung kepada pelayanan internal kepada pokja yang merupakan pegawai *ad hock* dari SKPD lain.

Mulailah dibuat Apel Baja dengan fasilitas yang sangat terbatas, yang penting PPK bisa mengajukan paket pekerjaan secara *paperless* dan memudahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Jadilah Apel Baja sederhana yang mempunyai fitur seperti *grand design* yang telah ditentukan. Sebelum diluncurkan untuk digunakan sebagai aplikasi resmi UPT P2BJ, dilakukan *review design* dan evaluasi terhadap aplikasi tersebut oleh Kepala UPT P2BJ, Seksi Distribusi dan Pengaduan maupun pegawai dari UPT P2BJ. Evaluasi dilakukan secara kontinyu sebagai bentuk perhatian terhadap pentingnya perbaikan pelayanan yang diberikan, atau dalam motto UPT P2BJ ingin menjadikan pengadaan barang/jasa di Jawa Timur kredible dan mensejahterakan bangsa.

Pada tanggal 16 April 2014 dilaksanakan *launching* Apel Baja dengan menghadirkan PPK, Admin SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rapat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Jawa Timur. Dengan digunakannya Apel Baja sebagai sistem online untuk memudahkan pelayanan pengadaan barang/ jasa menandakan adanya perubahan paradigma yang akan merubah wajah pengadaan barang/ jasa semakin cerah. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan untuk meningkatkan pelayanan, Apel Baja pun semakin disempurnakan dengan menambahkan beberapa *interface* dan fitur layanan diantaranya fasilitas pengembalian paket secara online. Tahun 2015 aplikasi pengembalian telah bisa digunakan namun masih terpisah *login* antara Apel Baja pada aplikasi pengajuan dan aplikasi pengembalian paket pekerjaan. Keduanya sudah bisa berjalan dengan baik dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Perkembangan ini dimotori oleh Tim IT UPT P2BJ yang gerilya dengan cepat untuk melakukan strategi perbaikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahun 2016 dilakukan perubahan yang signifikan terhadap Apel Baja, diantaranya terkait dengan *basic data*, *interface* secara makro yang lebih *friendly* dan *smooth*, integrasi antara aplikasi usulan paket dan pengembalian paket, hak akses yang lebih *secret* pada masing-masing user dan penambahan fitur-fitur yang diperlukan untuk *report* dan pelaporan pada *monev*. Perubahan ini menjadikan Apel Baja 2016 lebih handal dan mumpuni untuk menjawab permasalahan pelayanan di UPT P2BJ. Terbukti sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 pukul 14.30 data pada *monev* tercatat 110 pekerjaan yang telah di ajukan, 68 pekerjaan selesai, 34 pekerjaan dalam proses dan 8 pekerjaan dalam proses kaji ulang Pokja

File Pendukung : [Pendukung6.jpg](#)

**Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?**

Terciptanya Apel Baja tidak terlepas dari pihak - pihak yang memiliki kepentingan dalam hal manfaat layanan dan penggunaan dampak, pihak - pihak tersebut adalah:

- a. Pegawai UPT P2BJ, terdiri dari Seksi Pelayanan UPT P2BJ, Seksi Distribusi dan pengaduan UPT P2BJ, Kepala UPT P2BJ dan Kelompok Kerja (Pokja). Seksi Pelayanan sebagai perancang *grand design* dan *flow chart* dari awal hingga saat ini yang merupakan garda terdepan yang menentukan kinerja UPT P2BJ. Seksi Distribusi dan Pengaduan yang bertugas memberikan pelayanan internal memberikan koreksi dan evaluasi terhadap *flow chart*, *interface* dan fitur pada Apel Baja. Kepala UPT sebagai *leading sector* penentu kebijakan Apel Baja yang memberikan arahan secara umum konsep dan pengembangan Apel Baja. Pokja yang sebagian besar merupakan pegawai *ad hock* memberikan masukan terkait dengan adanya *sms broadcast* sebagai moda pemberitahuan aktif ketika ada penugasan yang masuk ke dalam pokja yang berkaitan;
- b. Tim Teknologi Informasi, Tim yang dibentuk untuk menyempurnakan fitur sederhana Apel Baja pada Tahun 2014, membuat aplikasi pengembalian dokumen hasil pelelangan yang digunakan pada tahun 2015 dan melakukan pemeliharaan struktur maupun infrastruktur terkait dengan Apel Baja meliputi pemeliharaan *data base* dan server;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, yang menjadi pengguna layanan/ klien dalam pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Provinsi Jawa Timur. PPK memberikan masukan terkait dengan *design* yang ada pada *interface* yang ada di SKPD untuk dapat memantau progres paket pekerjaan yang diajukan;
- d. Konsultan, yang membuat Apel Baja pada awal tahun 2014 untuk aplikasi pengajuan paket lelang dan pada akhir tahun 2015 membuat pengembangan dan penyempurnaan Apel Baja untuk digunakan pada tahun 2016 ;

**Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?**

Sumber Daya yang berperan dalam perencanaan, pembuatan dan pengembangan aplikasi Apel Baja diantaranya adalah Sumber Daya Manusia terdiri dari pegawai UPT P2BJ yang dipimpin oleh Kepala UPT P2BJ. Kepala Seksi Pelayanan melakukan perancang *grand design* dan *flow chart* serta gambaran secara garis besar hingga detail kerja sistem yang akan dibangun oleh konsultan. Penyedia jasa konsultasi yang merupakan pihak ke 3 (tiga) bertugas sebagai pembuat aplikasi pada awal tahun 2014 dan akhir tahun 2015. Untuk memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang membangun Apel Baja, UPT P2BJ membentuk tim teknologi informasi yang merupakan pegawai interen dan di ketuai oleh Kepala Seksi Pelayanan UPT P2BJ. Tim ini mempunyai tugas untuk menginventarisir kekurangan dan kelemahan aplikasi lalu melakukan perbaikan dari segi tampilan, fasilitas dan fitur-fitur tambahan untuk memudahkan pencarian dan pengolahan data.

Sumber daya yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi Apel Baja adalah pendanaan yang bersumber dari DPA APBD Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 dan DPA UPT P2BJ Tahun Anggaran 2015. Dukungan dana merupakan bentuk apresiasi dan komitmen dari Gubernur Jawa Timur dan pihak Legislatif dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pelayanan pengadaan barang/ jasa yang kredibel mensejahterkan bangsa. Pendanaan ini digunakan untuk membiayai pembuatan Apel Baja sederhana tahun 2014 dan pengembangan serta penyempurnaannya pada tahun 2015. Selain itu juga untuk pengadaan infrastruktur berupa server, UPS, rak server dan infrastruktur pendukung lain. Pendanaan ini juga digunakan untuk melakukan sosialisasi beberapa kali ke Admin SKPD dan PPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sumber dana dari DPA APBD untuk membiayai Apel Baja dan sarana prasarana pelayanan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan, tercatat pada tahun 2015 dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri PPK SKPD sebesar Rp. 3.508.217.053.184,00 terkontrak sebesar Rp. 3.254.183.788.544,00 dapat dihemat dan kembali ke kas daerah sebesar Rp. 254.033.461.248,00. Besarnya penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan maupun pembangunan pelayanan dasar yang lain. Ini menunjukkan bahwa support dana pada UPT P2BJ tidak terbuang sia-sia, namun dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja pelayanan hingga dapat menghemat belanja daerah.

Sumber daya teknis pada Apel Baja dibagi menjadi dua yaitu software dan hardware. Software terdiri dari data base, Oracle, Malware, Antivirus, jaringan. Sedangkan hardware terdiri dari komputer, server, rak server, Uninterruptible Power Supply (UPS), Router. Software dan hardware terintegrasi membentuk fungsi untuk menjalankan perintah pengguna. Keberlangsungan sumber daya teknis tersebut dipelihara oleh sumber daya manusia secara berkala sesuai dengan prosedur manajemen sistem. Apabila ada kerusakan pada software maupun hardware didukung oleh sumber daya keuangan untuk melakukan pemeliharaan maupun pergantian pada item yang rusak. Ketiga sumber daya tersebut saling melengkapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan hingga terbentuklah Apel Baja yang handal dan mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### **Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?**

Output yang dapat dipetik dengan adanya Apel Baja adalah memutuskan *Long Distance Relationship* (LDR) antara PPK dan UPT P2BJ. Maksudnya adalah poses kerjasama yang terjalin dalam pengadaan barang/jasa dengan jarak yang jauh tidak lagi menjadi masalah dengan adanya Apel Baja. Tidak perlu meluangkan waktu, menyediakan biaya perjalanan dinas dan meninggalkan tugas pokok di SKPD masing-masing untuk bisa melakukan usulan paket pekerjaan untuk di lelangkan. Cukup dengan mengakses [p2bj.jatimprov.go.id](http://p2bj.jatimprov.go.id) di alamat web maka Apel Baja sudah hadir di depan PPK untuk dapat membantu tugasnya sebagai penanggungjawab pengadaan barang/jasa. Jarak terselesaikan merambah pada terselesaikan permasalahan biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk mendukung pengusulan paket pekerjaan dan dokumen hasil pelelangan.

Apel Baja mampu memberikan kejelasan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi PPK dalam mengusulkan paket pekerjaan. Karena untuk masing-masing jenis pelelangan yaitu konsultasi, konstruksi, barang dan jasa lainnya mempunyai persyaratan yang berbeda dalam mengusulkan dokumen untuk di lelangkan. Selain itu, melalui sistem berbasis web data yang disampaikan akan lebih aman dan terjaga kerahasiaannya. Kerahasiaan dimaksudkan untuk menjaga persaingan dalam pelelangan agar kompetisi bisa terwujud dengan baik sehingga didapatkan barang/jasa yang terbaik, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dengan harga terendah.

Verifikasi, koreksi online dalam Apel Baja memberikan kecepatan pelayanan dalam pengusulan dokumen lelang. Pegawai UPT P2BJ yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan koreksi pun bisa melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan daftar antrian yang masuk dan bisa di eksekusi saat itu juga. Ini efektif untuk meningkatkan kinerja PPK dan P2BJ dalam memberikan pelayanan. Dokumen usulan lelang yang sudah sesuai dengan persyaratan dilanjutkan dengan pemberian SPT melalui Apel Baja. Dalam sistem akan menghitung *Tracking* kinerja pokja sejak dokumen tersebut



diterima dan harus segera ditindak lanjuti. Sesuai dengan SOP batas maksimal untuk melelangkan selama 4 (empat) hari kerja, jika tidak ada tindaklanjut dari pokja maka Apel Baja akan mencatat keterlambatan Pokja, dan penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja.

Permasalahan penyerapan anggaran belanja pengadaan barang/jasa yang seringkali menumpuk pada triwulan ke empat diakhir tahun bisa di evaluasi melalui Apel Baja. Monitoring dan evaluasi Apel Baja bisa mengidentifikasi penyebab lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan keterlambatan pengusulan proses lelang. Tercatat beberapa pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya diajukan pada bulan pertengahan hingga akhir tahun sehingga waktu pelaksanaan hingga pembayaran pekerjaan hampir terjadi akhir tahun, bahkan karena ketidak cukupan waktu, pekerjaan tidak bisa dilelangkan dan anggaran yang sudah harus dikembalikan ke kas daerah. Apel Baja sebagai sarana deteksi untuk mempercepat pengadaan barang/jasa dan pembangunan di Provinsi Jawa Timur

### **Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?**

Untuk meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Provinsi Jawa Timur, UPT P2BJ menggaransi pelayanan yang diberikan kedalam ISO 9001:2008 yang selanjutnya diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu. Dalam ISO tersebut memberikan kejelasan persyaratan, keluhan hingga kepuasan pelanggan; konsistensi pelayanan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kehandalan sistem, Apel Baja telah lolos verifikasi dalam ISO 2700:2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk memberikan pengamanan informasi untuk memastikan tentang kerahasiaan (*confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*availability*). Kedua jenis ISO tersebut secara kontinyu melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan sistem dalam Apel Baja untuk tetap sesuai dengan prosedur, dan melakukan peningkatan hasil pencapaian pada tahun sebelumnya.

Tim IT yang dibentuk oleh UPT P2BJ mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Apel Baja. tim ini terdiri dari ketua tim yang secara langsung dipimpin oleh kepala seksi layanan UPT P2BJ, sedangkan tim teknis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tim software (pemrograman), tim hardware dan tim design aplikasi. Tim ini secara simultan melakukan evaluasi untuk memelihara dan mengembangkan Apel Baja. Beberapa kali dilaksanakan pertemuan tim untuk menginventarisir permasalahan dalam aplikasi untuk diselesaikan, membuat strategi pengembangan aplikasi termasuk terkait hal teknis yang mendukung kemajuan aplikasi. Seperti halnya pengembangan pada Apel Baja 2014 menjadi Apel Baja 2015, terdapat perbaikan secara signifikan dari *interface*, *flowchart*, *data base*, *struktur data*, maupun *fiture* dan *hardware* pendukung lainnya.

Sistem yang dibangun pada Apel Baja secara otomatis memberikan ketergantungan pada pengguna yang terbagi kedalam pemberi dan penerima layanan. Apabila terdapat kekurangan pada Apel Baja yang dapat menghambat kinerja pengguna secara otomatis akan disampaikan kepada tim IT untuk dilakukan perbaikan. Semakin banyak pengguna, semakin banyak kemungkinan untuk memunculkan inovasi dan saran yang akan membuat Apel Baja semakin handal. Seperti halnya ketika Apel Baja 2015 baru diluncurkan, ada banyak masukan dan saran dari pengguna yang berasal dari SKPD maupun internal UPT P2BJ sebagai bahan melakukan kajian ulang dan menyusun strategi perbaikan.

## **Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Apel Baja sampai dengan tahun 2016 sudah semakin berkurang. Kendala ini banyak terjadi pada awal pembuatan dan penerapan Apel Baja yaitu tahun 2014. Melalui inovasi dan perbaikan sistem, pada tahun 2015 kendala yang dihadapi menurun drastis. Karena Apel Baja merupakan aplikasi yang pertama tentang pelayanan pengadaan barang/jasa dan belum ada referensi sebelumnya, maka diawal pembuatannya mengalami banyak kesulitan terkait dengan pembuatan *flowchart*, model dan bentuk aplikasi, metode penggunaan aplikasi, pengelolaan *database*. Penuangan dari bahasa fikiran kedalam aplikasi tidaklah mudah, sehingga perlu berkali-kali perbaikan untuk dapat menuangkan sesuai dengan harapan. Setelah Apel Baja terbentuk dan bisa digunakan, permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan dan penyempurnaan sistem, penambahan fitur termasuk penambahan aplikasi pengembalian dokumen hasil lelang.

Terhadap berbagai permasalahan pada pengembangan Apel Baja diselesaikan dengan pembentukan Tim IT UPT P2BJ. Tim IT yang diketuai oleh Kepala Seksi Pelayanan bekerja ekstra melakukan inventarisir permasalahan, membuat strategi pemecahan masalah termasuk pembagian tugas serta target penyelesaiannya. Perlahan-lahan namun pasti, dari 2014 sampai dengan 2016 sudah terjadi perbaikan sistem yang cukup signifikan sehingga bisa memaksimalkan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kendala lain juga terjadi pada awal penggunaan Apel Baja yang sekarang sedikit demi sedikit mulai terselesaikan adalah pada sumber dana dan sarana prasarana pendukung. Ibarat mau beli makan di warung jika tidak punya uang untuk membayar, maka tidak bisa makan. Demikian halnya dengan Apel Baja, pada awalnya kebutuhan dana didukung oleh DPA APBD Badan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 dan pada 2015 telah dapat di biayai oleh DPA UPT P2BJ sendiri. Sumber dana tersebut diantaranya digunakan untuk belanja hardware dan software. Hardware meliputi pengadaan server, rak server, UPS, AC server, *data storage*, *Network Operations Centre (NOC)*, *Security Access* ruang server. Software meliputi sistem operasi server, software pengembangan aplikasi PHP (*Open Source*) dan software antivirus.

## **Dampak dan Keberlanjutan**

### **Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?**

Manfaat utama dari penggunaan Apel Baja secara umum dapat dibagi kedalam manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal terkait dengan manfaat yang didapatkan oleh seluruh pengguna Apel Baja di UPT P2BJ. Apel Baja memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan yang diberikan oleh UPT P2BJ kepada PPK SKPD. Pelayanan yang diberikan semakin jelas dan transparan, masing-masing user mulai dari Seksi Pelayanan, Seksi Distribusi Pengaduan, Kepala UPT P2BJ dan Pokja memiliki banyak kemudahan jika dibandingkan dengan proses manual yang dilaksanakan pada awal pembentukan UPT P2BJ. Seksi Pelayanan lebih mudah dalam melakukan pengecekan usulan paket lelang, memberikan koreksi dan menindaklanjuti apabila sudah benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan dalam SOP. Selanjutnya Seksi Distribusi dan Pengaduan dapat

mendistribusikan pekerjaan melalui SPT online kepada Pokja, melakukan evaluasi kinerja Pokja, melakukan verifikasi dan pengiriman lelang gagal dan pengembalian hasil lelang kepada PPK SKPD. Terkait dengan fungsinya menerima dan menindaklanjuti pengaduan, Apel Baja memberikan kemudahan dalam pendataan sanggahan dari peserta lelang dan saran maupun masukan terhadap paket pekerjaan yang telah selesai lelang dan dikembalikan kepada SKPD.

Kepala UPT P2BJ sebagai top manajer yang mempunyai fungsi dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP, memberikan penilaian dan kontrol terhadap kinerja pegawai serta tugas pokok dan fungsi yang lain dapat terbantu dengan adanya Apel Baja. Apel Baja menyediakan fasilitas penilaian kinerja berupa ketepatan waktu untuk melakukan tindakan terhadap usulan paket pekerjaan untuk di lelangkan. Misalkan di Seksi Pelayanan mempunyai batas maksimal 4 (empat) hari kerja untuk melakukan verifikasi dan penilaian usulan paket pekerjaan, apabila lebih dari waktu yang ditentukan akan tercatat pada sistem dan Kepala UPT P2BJ dapat memberikan penilaian kinerja dan menentukan kebijakan agar pelayanan tidak melebihi batas maksimal dalam SOP. Demikian juga Pokja memiliki kewenangan untuk melakukan kaji ulang terhadap usulan paket pekerjaan selama 4 (empat) hari kerja, apabila melebihi ketentuan akan tercatat dalam Apel Baja. Termasuk dengan semua riwayat pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi layanan, sehingga melalui sistem akan memperbaiki kinerja, integritas dan profesionalitas Pegawai UPT P2BJ.

Manfaat eksternal merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima pelayanan yaitu PPK SKPD. PPK SKPD sebelum diterapkan Apel Baja mengalami banyak kesulitan seperti yang telah diuraikan diatas, namun dengan adanya sistem informasi ini kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat dirasakan oleh PPK. Seperti data surve IKM terhadap kepuasan pelayanan pada 2015 yang dilakukan kepada PPK dan penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan baik menang ataupun kalah sebagian besar menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Nilai yang didapatkan rata-rata diatas nilai standar 70. Artinya dalam permulaan berdirinya UPT P2BJ pada tanggal 3 february 2014 telah mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan semua pihak sehingga masing-masing penerima layanan dapat merasakan kepuasan. Masih berdasarkan surve IKM bahwa pelayanan yang diberikan dilakukan tanpa pungutan biaya atau gratis terbukti dengan nilai pada point biaya pelayanan mendapatkan nilai 100.

Contoh konkrit penerapan Apel Baja dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik adalah semakin berkurangnya intensitas pertemuan pemberi dan penerima layanan, namun kinerja dan kerjasama yang dilakukan semakin baik. PPK SKPD sudah bisa mengakses Apel Baja melalui komputer/laptop maupun alat komunikasi lain yang dilengkapi dengan fasilitas internet tanpa harus bertemu dan mendapatkan pelayanan langsung di kantor UPT P2BJ. Profesionalitas kerja semakin ditingkatkan dengan memberikan catatan waktu pada setiap bagian untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan SOP mulai dari PPK SKPD, Seksi Pelayanan, Seksi Distribusi dan Pengaduan, dan Kepala UPT P2BJ serta Kelompok Kerja. Untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai UPT P2BJ, dilakukan evaluasi kinerja secara berkala oleh Kepala UPT P2BJ berdasarkan data dari Apel Baja tentang catatan waktu kerja yang disediakan.

Kelebihan penggunaan Apel Baja seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, secara umum Apel Baja memberikan dampak terhadap semakin baiknya pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diberikan oleh UPT P2BJ. Terbukti pada 2014 UPT P2BJ telah mampu menghemat belanja pemerintah dari total 1.300 paket pekerjaan yaitu sebesar Rp. 208.509.245.000,00 dari alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 1.908.413.719.000,00 . Sedangkan pada Tahun 2015 terjadi peningkatan belanja pemerintah sebanyak 1.528 paket pekerjaan dan semakin besar juga

penghematan yaitu sebesar Rp. 254.033.420.288,00 dari alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 3.508.217.192.448,00. Semakin besarnya penghematan dalam belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan semakin baik nya kinerja UPT P2BJ, sehingga penghematan tersebut akan kembali ke kas daerah dialokasikan untuk pembiayaan lain.

### **Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?**

Apel Baja merupakan aplikasi berbasis online UPT P2BJ yang dibuat pada April 2014 lalu, dikembangkan secara bertahap pada 2015 dan mengalami penyempurnaan hingga penerapan pada 2016. Dari awal pembuatannya, Apel Baja mengalami berbagai penyempurnaan mulai yang sederhana hingga rumit, mulai dari *interface*, struktur data hingga databasenya. Harapannya aplikasi ini dapat menjawab dan mendukung kebutuhan pelayanan yang mungkin untuk berkembang lebih dinamis seiring berjalannya waktu. Aturan terkait dengan SOP pun secara bertahap mulai disusun, mulai dari SOP pelayanan yang dituangkan dalam bentuk aplikasi ini. selanjutnya menyusul juga SOP pengaduan dan sanggah yang juga akan menyempurnakan fitur pada Apel Baja. Apabila terjadi perubahan secara signifikan tentang peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebabkan perubahan tata kelola, Apel Baja pun akan mengikuti untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan.

Berbagai sumberdaya yang mendukung Apel Baja juga semakin ditingkatkan. Berawal dari tahun 2014 tidak mempunyai anggaran sendiri dan harus meminta pada SKPD induk hingga mampu membiayai pengembangan Apel Baja, belanja server, UPS, Rak server dan peralatan pendukung lainnya. Tuntutan perkembangan teknologi informasi pun juga akan berdampak perangkat pendukung ini harus disesuaikan dengan yang teknologi terbaru. Apel Baja ini juga memberikan perubahan pada budaya kerja petugas pemberi layanan. Dahulunya setiap aksi kerjanya tidak pernah tercatat sekarang sudah tercatat secara detail dan apabila terlambat akan berpengaruh pada prestasi kerjanya. Secara makro, dengan semakin efektifnya Apel Baja ini akan berpengaruh pada biaya pendukung PPK SKPD yang dulunya untuk mendukung pengusulan pengadaan barang/jasa sekarang jadi tidak diperlukan lagi.

Apel Baja dalam proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan Ham untuk mendapatkan hak paten atas hak cipta. Beberapa studi banding ke P2BJ banyak dilakukan oleh ULP lain, tercatat sedikitnya 20 ULP berharap bisa membuat aplikasi serupa untuk memudahkan dan mempercepat pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam presentasi Apel Baja dijelaskan fungsi dan manfaat serta kelebihan menggunakan aplikasi ini. Berbagi cerita tentang permasalahan pengadaan barang/jasa terjadi, hingga pihak ULP lain yang melakukan studi banding semakin mengakui bahwa Apel Baja bisa menjadi solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa yang selama ini dihadapi dan menjadi penghambat. Terbukti dengan menggunakan Apel Baja pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin cepat dan akurat. Harapannya keberhasilan ini bisa diikuti oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa di kabupaten/kota maupun provinsi lain. Bisa dibayangkan jika kondisi suatu daerah adalah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara dimana akan menjadi tidak efektif jika dilakukan perjalanan darat dan laut untuk melakukan pengusulan lelang dan koordinasi tentang pelelangan, Tentunya yang dapat menjawab permasalahan ini adalah aplikasi berbasis internet seperti Apel Baja.

ULP dimasing-masing daerah memiliki karakteristik dan struktur organisasi yang berbeda, bergantung pada kebijakan kepala daerah akan dibuat dan disusun seperti apa sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan organisasi dan perangkat daerah. Apel Baja bisa disusun mengikuti struktur organisasi yang berbeda, mekanisme *flow chart* yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu aplikasi ini bisa direplikasi di ULP lain untuk mendapatkan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan maksimal. Seperti halnya ULP Provinsi Kalimantan Timur yang beberapa kali melakukan studi banding telah membuat aplikasi serupa dengan nama ' Siap Bajasa'.

### **Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?**

Pembuatan Apel Baja pada awalnya tidak mudah dan mengalami berbagai permasalahan terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Namun hal itu tidak menjadikan semangat untuk membuat pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kredible menurun begitu saja. Berbagai upaya dilakukan termasuk dengan meminta anggaran pada DPA Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD induk pada tahun 2014 untuk membiayai pembuatan Apel Baja sederhana. Penyimpanan data base sementara di ikutkan pada saudara se-atap UPT P2BJ yaitu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T) Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga belum adanya sarana pendukung lain berupa UPS, Rak Server, Kelengkapan Ruang Server, Kelengkapan arsip dokumen hasil lelang dan dokumen penawaran serta dana untuk melakukan sosialisasi kepada PPK SKPD. Berbagai keterbatasan yang ada tidak menjadi hambatan yang besar jika ada komitmen yang kuat untuk mewujudkannya dan pada akhirnya Apel Baja bisa hadir memberikan pelayanan prima kepada PPK SKPD.

Dalam pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Apel Baja bisa dikelola oleh tim IT yang berasal dari pegawai UPT P2BJ, hal ini akan memudahkan dalam melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan *flow chart*, perlu penambahan fitur-fitur maupun fasilitas lain. Penganggaran untuk membiayai tim IT akan lebih hemat jika dialokasikan kepada konsultan yang secara periodik melakukan perbaikan, dan yang paling penting adalah ketergantungan kepada konsultan akan semakin berkurang sehingga Apel Baja semakin mandiri dan tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan tertentu. Dari sisi lain, tim IT yang solid akan menjadikan kinerja UPT P2BJ semakin kompak bagaikan kapal yang berlayar ke samudra untuk mengarungi derasnya ombak pengadaan barang/jasa dengan satu kendali dari Kepala UPT P2BJ.

Apel Baja tidak terbatas ruang dan waktu, yang membatasi adalah tidak adanya koneksi internet dan mati nya server sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Seperti pada awal membangun Apel Baja, karena belum terpasang UPS pada saat listrik padam beberapa saat terjadi trobel pada data base yang berakibat pada hilangnya database yang belum terbackup secara berkala. Hal ini memberikan pelajaran yang cukup berharga sehingga manajemen security sistem, keamanan dan keterjaminan data semakin ditingkatkan. Ditandai dengan didapatkannya ISO 2700:2013 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk memberikan pengamanan informasi untuk memastikan tentang kerahasiaan (*confidentiality*), Integritas (*Integrity*), dan Ketersediaan (*availability*). Sistem keamanan informasi ini menggaransi keberlangsungan Apel Baja hingga dapat digunakan optimal sampai dengan saat ini dan trobel yang mungkin terjadi dapat diminimalisir dengan baik melalui tim IT masuk dalam management tim ISO.

Apel Baja ini sebagai salah satu solusi pelayanan pengadaan barang/jasa yang menjembatani

Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP. Dengan Apel Baja pelayanan pengadaan barang/jasa akan semakin transparan dan kredibel mensejahterakan bangsa. Pengguna yang terhubung dapat berkoordinasi dengan baik melalui sistem dengan prosedur dan ketentuan yang jelas. Sehingga Apel Baja bisa di rekomendasikan sebagai aplikasi penghubung yang melengkapi pengadaan barang/jasa semakin baik mulai dari perencanaan sampai dengan kontrak